

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sekilas Kabupaten Pati

2.1.1 Geografis Kabupaten Pati

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah secara geografis terletak di 644'56,80" LS 11102'06,96" BT dengan luas wilayah keseluruhan 1.419,07 km yang terbagi menjadi 21 Kecamatan dan 405 Desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora di sebelah selatan, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di sebelah barat, serta Kabupaten Rembang dan Laut Jawa di sebelah timur. Luas wilayah Kabupaten Pati adalah 150.368 Ha. Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah bagian timur.

Potensi sumber daya alam Kabupaten Pati bisa diandalkan, Kabupaten yang berada di sebelah timur bagian utara Provinsi Jateng ini secara topografi, wilayahnya dibedakan menjadi dataran rendah, pegunungan, dan lereng gunung. Sektor pertanian memang masih menjadi tulang punggung ekonomi Pati terutama bahan tanaman pangan dan buah-buahan. Usaha agroindustri juga turut dikembangkan, tanaman sayur-sayuran juga tidak kalah dalam produksi, seperti bawang merah, jagung, kacang tanah, kacang hijau, hingga cabai banyak dibudidayakan di beberapa kecamatan.

Kacang tanah lebih untuk memenuhi kebutuhan pabrik-pabrik makanan dari kacang tanah seperti pabrik Garuda dan kacang Dua kelinci yang berada di Kabupaten ini. Tanaman perkebunan juga tumbuh subur, potensi hasil perkebunan yang cukup mencolok adalah produksi kelapa, juga perkebunan kopi yang berada di enam kecamatan yakni Gembong, Sukokilo, Tlogowungu, Margoyoso, Gunungwungkal, dan Cluwak yang hasilnya antara lain dipasarkan ke beberapa industri pengolahan kopi di kabupaten ini.

Wilayah Pati yang berbatasan dengan laut, sudah tentu mengandalkan perikanan, Kabupaten ini menjadi salah satu penghasil ikan di Jawa Tengah, terdapat juga hasil tambak, produksi ikan terbesar dihasilkan dari budi daya tambak dengan lahan tambak terutama banyak tersebar di Kecamatan Juwana berupa petak-petak yang letaknya mendekati bibir pantai. Jenis ikan bandeng dan udang banyak dibudidayakan disini. Selain ikan segar, banyak pula diusahakan ikan olahan dengan cara pengawetan atau pengeringan ikan menjadi ikan asin, ikan pindang, atau pun ikan asap.

Letak Pati memang strategis, berada di jalur padat lalu lintas antara Semarang-Surabaya ini membawa dampak yang cukup bagus bagi sektor perdagangan. Pemasaran komoditas pertanian, perikanan, dan hasil industri selain lewat pelabuhan yakni perdagangan antar pulau dan ekspor mancanegara juga melalui jalur darat untuk perdagangan antar kabupaten maupun antar provinsi.

Kota Pati terletak di daerah Pantura (Pantai Utara) dekat dengan laut utara pulau jawa. kota ini terdiri lebih dari 20 kecamatan, diantaranya

adalah kecamatan Gabus, Tambakromo, Winong, dan lainnya. Kota Pati termasuk dalam eks karisidenan yang meliputi wilayah Kudus, Jepara, Blora. Kota ini masih berada di wilayah propinsi Jawa Tengah. Kegiatan yang dilakukan masyarakat kota pati beragam, ada yang berprofesi sebagai petani, nelayan, PNS, buruh, ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai paranormal, bahkan untuk profesi tersebut sudah diakui oleh masyarakat Indonesia, ataupun masyarakat dunia khususnya di Asia. Situs-situs peninggalan masyarakat terdahulu masih menyimpan misteri untuk dapat diungkapkan. Hal ini terjadi karena dulunya wilayah pati merupakan daerah kerajaan Majapahit dan Mataram.

2.1.2 Demografis Kabupaten Pati

Penduduk Kabupaten Pati berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2014 adalah 1.218.016 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 590.181 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 627.835 jiwa. Dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati, Kecamatan Pati mempunyai jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu sebanyak 105.172 jiwa.

Penduduk Kabupaten Pati rata-rata bekerja dibidang pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; listrik, air dan gas; bangunan; perdagangan besar dan eceran, rumah makan dan hotel; angkutan, pergudangan dan komunikasi; keuangan, asuransi dan persewaan bangunan perusahaan, serta bidang jasa masyarakatan. Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Pati pada 31 Desember 2013 sebanyak 12.514 orang, terdiri dari 6.504 orang atau 52% berjenis kelamin laki-laki dan 6.010 orang atau 48%

merupakan pegawai perempuan. Dilihat dari jenjang pendidikan PNS di Kabupaten Pati, sebagian besar merupakan pegawai dengan tingkat pendidikan S1 dan SLTA. Jumlah PNS dengan pendidikan S1 sebanyak 6.768 orang atau 54,08% dari total PNS, sedangkan PNS dengan pendidikan SLTA sebanyak 2.630 orang atau 21,02% dari total PNS di Kabupaten Pati.

2.2 Sosial

2.2.1 Pendidikan

Sebagian besar penduduk Kabupaten Pati merupakan penduduk yang berpendidikan. Sebanyak 73.285 penduduk tidak atau belum tamat SD, sebanyak 332.441 penduduk tamat SD, penduduk yang mampu menyelesaikan sekolah hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 203.175 penduduk, dan yang mengenyam pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 151.946 penduduk. Di kabupaten ini juga terdapat penduduk yang mengenyam pendidikan hingga jenjang akademi, Strata 1 dan Starata 2 sebanyak 34.118 penduduk.

2.2.2 Agama

Sebagai bangsa yang majemuk, Kabupaten Pati memiliki penduduk yang memeluk beberapa macam agama. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Pati yaitu agama Islam dianut oleh 1.154.431 penduduk; agama Kristen dianut oleh 26.478 penduduk; agama Katolik dianut oleh 3.141 penduduk; agama Hindu dianut oleh 98 penduduk; agama Buddha dianut oleh 3.191 penduduk; agama Khong Hu Chu dianut oleh 23 penduduk dan sebanyak 1.351 penduduk menganut kepercayaan lainnya.

2.3 Pemerintahan

Sejak otonomi daerah pada tahun 2010, jumlah kecamatan di Kabupaten Pati tidak mengalami perubahan yaitu 21 kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan, 1.106 dukuh serta 1.474 RW dan 7.524 RT. Pada tahun 2006 jumlah desa/kelurahan menjadi 406 desa/kelurahan dari 405 desa/kelurahan, karena ada pemecahan desa yaitu Desa Pantirejo dan Desa Kosekan. Semenjak tahun 2007 tidak ada lagi pemekaran daerah di Kabupaten Pati. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pati Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Sukolilo	16	477	81
2	Kayen	17	434	70
3	Tambakromo	18	340	62
4	Winong	30	471	82
5	Pucakwangi	2	331	68
6	Jaken	21	311	81
7	Batangan	18	273	53
8	Juwana	29	336	87
9	Jakenan	23	356	57
10	Pati	24/5	570	10
11	Gabus	24	401	76
12	Margorejo	18	317	36
13	Gembong	11	276	85
14	Tlogowungu	15	321	70
15	Wedarijaksa	18	339	58
16	Trangkil	16	374	60
17	Margoyoso	22	336	38
18	Gunung Wungkal	15	239	47
19	Cluwak	13	309	77
20	Tayu	21	395	75
21	Dukuhseti	12	345	46

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pati tahun 2010

2.4 Situasi dan Kondisi Politik

2.4.1 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pati tahun 2004

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 di
Kabupaten Pati pada Putaran 1:

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H.Wiranto, SH dan Ir.Salahuddin Wahid	126.983
2	Hj.Megawati Soekarnoputri dan KH.A.Hasyim Muzadi	250.056
3	Prof.Dr.H.M. Amien Rais dan Drs.Ir.H.Siswono Yudho Husodo	44.737
4	H.Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs.Jusuf Kalla	235.913
5	Dr.H.Hamzah Haz dan H.Agum Gumelar, M.Sc	12.333

Sumber: KPU Kabupaten Pati tahun 2004

Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan presiden dan wakil presiden sebanyak 670.022 suara sah. Karena tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega Hasyim. Pemilihan umum putaran kedua. Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 Di
Kabupaten Pati pada Putaran 2:

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Hj.Megawati Soekarnoputri dan KH.A.Hasyim Muzadi	334.113
2	H.Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs.Jusuf Kalla	317.517

Sumber: KPU Kabupaten Pati tahun 2004

Jumlah suara sah untuk seluruh pasangan presiden dan wakil presiden sebanyak 651.630 suara sah.

2.4.2 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pati tahun 2009

Pada Pemilu Presiden 2009 diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Jusuf Kalla-Wiranto. Pemungutan suara diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 di
Kabupaten Pati

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Hj.Megawati Soekarnoputri – H.Prabowo Subianto	302.828
2	Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono-Prof.Dr.Boediono	302.973
3	Drs.Jusuf Kalla –H.Wiranto, SH	36.482

Sumber: KPU Kabupaten Pati tahun 2009

Pemilu presiden di Kabupaten Pati dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang berhasil memperoleh suara sebesar 302.973 selisih tipis dengan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto yang mampu meraih suara sebesar 302.828. Sedangkan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto hanya mampu memperoleh suara sebanyak 36.482.

Kemenangan pasangan SBY-Boediono merupakan kemenangan luar biasa karena pada pemilu sebelumnya kekuatan politik Kabupaten Pati selalu didominasi oleh partai dengan latar belakang nasionalis yakni PDIP. Masyarakat Kabupaten Pati di Pemilu Presiden ini memilih pasangan SBY-Boediono karena sosok pribadi calon yang berwibawa dan kharismatik.

2.4.3 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pati tahun 2014

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Pasangan calon yang maju pada pilpres ini hanya ada 2, yaitu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tabel 2.5
Rekapitulasi Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di
Kabupaten Pati

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H.Prabowo Subianto dan Ir.H.M.Hatta Rajasa	197.058
2	Ir.H.Joko Widodo dan Drs.Jusuf Kalla	540.504

Sumber: KPU Kabupaten Pati tahun 2014

Jumlah suara sah sebanyak 737.562 suara, sedangkan suara tidak sah sebanyak 5.904 suara. Dari data jumlah pemilih sendiri ada 1.033.941, sedangkan jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 743.466.

Kemenangan Jokowi-JK ini merupakan kemenangan yang luar biasa, karena pasangan tersebut merupakan pasangan yang jumlah pendukung di DPRD Kabupaten Pati jumlahnya akalah dengan pendukung dari Prabowo-Hatta. Selain itu, kemenangan tersebut juga merupakan kemenangan yang membuktikan bahwa PDIP merupakan partai penguasa di Kabupaten Pati, selain sosok Jokowi yang merakyat dan sederhana.

Jumlah Persentase jumlah partisipasi warga dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati yaitu 74.06 %. Dari angka tersebut diketahui bahwa tingkat partisipasi warga Pati dalam Pilpres 2014 meningkat. Guna menjaga tingginya partisipasi masyarakat, perlu diadakan peningkatan sosialisasi dan digencarkan pentingnya partisipasi di dalam pemilihan umum berikutnya agar target semakin meningkat. Kabupaten Pati sendiri yang dari tahun 2009 ke tahun 2014 meningkat 2 persen. Itu artinya warga sudah menyadari pentingnya suara mereka di pemilu.

2.4.4 Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Pati Tahun 2004

Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004 dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Jumlah pemilih sebanyak 867.184 yang terbagi dalam 3.174 TPS, dan diikuti oleh 24 partai politik.

Tabel 2.6
Hasil Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2004 di Kabupaten Pati

NO	PARPOL	DPR	DPRD PROVINSI	DPRD KABUPATEN
1	2	3	4	5
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	5.735	5.688	6.483
2	Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD)	2.058	1.914	1.311
3	Partai Bulan Bintang (PBB)	16.670	17.009	19.624
4	Partai Merdeka	5.078	5.151	4.842
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	32.097	31.921	32.147
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK)	1.223	1.306	0
7	Partai Indonesia Baru (PIB)	912	1.012	0
8	Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBK)	14.395	14.392	16.262
9	Partai Demokrasi Rakyat (Demokrat)	45.884	42.988	36.906

1	2	3	4	5
10	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)	9.349	9.308	10.884
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	5.346	5.301	5.535
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	17.214	17.177	17.087
13	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	8.895	8.437	8.915
14	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	126.292	125.630	123.395
15	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	24.703	24.596	23.322
16	Partai Bintang Reformasi (PBR)	2.456	2.461	1.829
17	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	214.423	214.151	214.996
18	Partai Damai Sejahtera (PDS)	8.679	9.169	7.725
29	Golongan Karya (Golkar)	82.233	84.632	87.386
20	Partai Patriot Pancasila	2.023	1.976	2.321
21	Partai Sarikat Indonesia (PSI)	2.497	2.512	990
22	Parti Persatuan Daerah (PPD)	2.267	2.252	1.841
23	Partai Pelopor	15.764	17.218	19.312
JUMLAH		635.004	652.950	650.953

Sumber : KPU Kabupaten Pati tahun 2004

Untuk DPR, suara terbanyak adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu sebanyak 214.423 suara. Untuk DPRD Provinsi suara terbanyak juga dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu sebanyak 214.151 suara. Begitu pula dengan perolehan suara untuk DPRD Kabupaten, dimenangkan juga oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu sebanyak 214.996 suara.

2.4.5 Pemilu Legislatif Kabupaten Pati Tahun 2009

Pemilihan Umum Legislatif 2009 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2009. Pemilihan tersebut diikuti oleh 32 partai politik.

Tabel 2.7
 Hasil Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPR,
 DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2009 di Kabupaten Pati

NO	PARTAI POLITIK	DPR	DPRD PROVINSI	DPRD KABUPATEN
1	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	12.785	12.870	21.178
2	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	10.907	13.979	18.565
3	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI)	3.629	3.641	0
4	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	3.510	3.413	3.940
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	21.847	61.307	27.790
6	Partai Bela Negara (PBN)	5.966	6.976	12.439
7	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)	3.081	3.307	4.926
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	29.146	31.882	36.930
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	8.172	10.257	18.239
10	Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PIB)	464	511	0
11	Partai Keadilan (PK)	519	579	0
12	Partai Persatuan Daerah (PPD)	3.258	3.914	9.593
13	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	46.604	25.319	37.229
14	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	4.621	5.320	19.866
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM)	1.044	1.146	831
16	Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)	10.321	13.219	26.321
17	Partai Karya Perjuangan (Pakarpangan)	937	816	1.926
18	Partai Matahari Bangsa (PMB)	606	1.061	690
29	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	4.810	3.466	3.520
20	Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN)	2.240	2.967	2.462
21	Partai Pelopor	8.199	11.557	21.015
22	Partai Golongan Karya (Golkar)	51.591	46.487	56.569
23	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	18.265	17.056	23.904
24	Partai Damai Sejahtera (PDS)	2.113	2.160	0
25	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)	854	1.002	1.830
26	Partai Bulan Bintang (PBB)	12.709	17.405	19.219
27	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	163.397	125.618	141.547
28	Partai Bintang Reformasi (PBR)	1.619	1.199	1.848
29	Partai Patriot	278	0	209
30	Partai Demokrat	94.167	90.497	95.590
31	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	871	1.035	2.969

Sumber : KPU Kabupaten Pati tahun 2009

Untuk perolehan suara sah anggota DPRD kabupaten dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kabupaten Pati, Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDI-P) memperoleh suara sah paling banyak, yaitu sebesar 22,34 persen (141.547 suara sah). Kemudian diikuti oleh enam partai yang memperoleh suara sah 4 persen lebih berikutnya adalah : Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP).

2.4.6 Pemilu Legislatif Kabupaten Pati Tahun 2014

Tabel 2.8
Hasil Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2014 di Kabupaten Pati

NO	PARTAI POLITIK	DPR	DPRD PROVINSI	DPRD KABUPATEN
1	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	37.316	38.677	46.270
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	74.147	67.329	87.181
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	38.817	36.116	58.027
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	143.110	116.685	117.644
5	Partai Golongan Karya (Golkar)	86.541	34.980	64.677
6	Gerakn Indonesia Raya (Gerindra)	112.545	149.169	112.599
7	Partai Demokrat	52.121	86.404	76.972
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	29.809	12.082	16.604
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	21.327	21.054	45.818
10	Partai Nati Nurani Rakyat (Hanura)	29.076	27.789	64462
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	7.251	11.593	17492
12	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)	10.501	13.586	4965

Sumber : KPU Kabupaten Pati tahun 2014

Dewan Perwakilan Kabupaten Pati atau biasa disebut DPRD Kabupaten Pati mempunyai jumlah anggota mencapai 50 orang yang tersebar di delapan fraksi.

Berdasarkan perolehan suara Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, masing-masing terdistribusi :

Tabel 2.9
Komposisi Perolehan Kursi
DPRD Kabupaten Pati Tahun 2014

No	Nama Partai	Jumlah Kursi
1	Nasdem	4
2	PKB	6
3	PKS	5
4	PDI-P	8
5	Golkar	6
6	Gerindra	8
7	Demokrat	6
8	PPP	3
9	Hanura	4
	Jumlah	50

Sumber: KPU Kabupaten Pati tahun 2014

Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak mendapatkan kursi dalam pileg tahun 2014.

Untuk perolehan suara sah anggota DPRD kabupaten dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Pati, Partai Gerindra memperoleh suara terbanyak yaitu 149.169 suara sah. Kemudian disusul oleh PDI-P dengan 116.685 suara sah di urutan kedua. Urutan ketiga diduduki oleh Partai Demokrat dengan 86.404 suara sah, selanjutnya PKB dengan 67.329 suara sah, Nasdem dengan 38.677 suara sah, PKS dengan 36.116 suara sah, Golkar dengan 34.980 suara sah, Hanura dengan 27.789 suara sah, PPP dengan 21.054 suara sah, PKPI dengan 13.586 suara sah, PAN dengan 12.082 suara sah, dan yang terakhir adalah PBB dengan 11.593 suara sah. Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Pati dalam memilih sangat besar pada pemilu legislatif tahun 2014 tersebut, yaitu tercatat mencapai 73,38 persen.

2.4.7 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Pati tahun 2008

Pemilihan gubernur Jawa Tengah 2008 dilaksanakan untuk memilih gubernur provinsi Jawa Tengah periode 2008-2013.

Tabel 2.10
Jumlah Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Pati Tahun 2008

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H.Bambang Sadono,SH,MH dan Drs.H.Muhammad Adnan,MA	80.059
2	H.Agus Suyitno dan Drs.H.abdul Kholiq Arif,M.Si	22.225
3	H.Sukawi Sutarip,SH, SE dan DR.H.Sudharto, MA	154.440
4	H.Bibit Waluyo dan Dra.Hj.Rustiningsih, M.Si	140.245
5	Ir.H.Muhammad Tamzil,MT dan Drs.H.Abdul Rozaq Rais, MM	36.141

Sumber : KPU Kabupaten Pati tahun 2008

Jumlah perolehan suara sah sebesar 247.222 suara dan untuk suara tidak sah sebesar 23.988 suara.

2.4.8 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Pati tahun 2013

Pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah 2013 dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2013 untuk memilih Gubernur Jawa Tengah periode 2013–2018. Terdapat tiga pasang kandidat yang bersaing dalam pemilihan umum ini, yaitu Bibit Waluyo-Sudijono yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN); Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); dan Hadi Prabowo-Don

Murdono yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko yang diusung PDIP dengan suara sebesar 6.962.417 (48,82%) sesuai dengan keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah pada 4 Juni 2013.

Tabel 2.11
Jumlah Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Pati Tahun 2013

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Drs. H. Hadi Prabowo, MM dan Dr. H. Don Murdono, SH, M.Si	78.855
2	H. Bibit Waluyo dan Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si	174.825
3	H. Ganjar Pranowo, SH dan Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si	181.547

Sumber : KPU Kabupaten Pati tahun 2013

Pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak di tingkat Kabupaten Pati ini dimenangkan oleh pasangan H. Ganjar Pranowo, SH dan Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si , yaitu dengan jumlah suara 181.547. Pada posisi kedua ditempati oleh pasangan calon H. Bibit Waluyo dan Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si dengan memperoleh 174.825 suara. terakhir yaitu pasangan Drs. H. Hadi Prabowo, MM dan Dr. H. Don Murdono, SH, M.Si dengan 78.855 suara.

Partisipasi masyarakat Pati pada saat pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 tergolong rendah, yaitu hanya 44,52%.

2.4.9 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2006

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati pada tahun 2006 dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2006. Untuk pertama kalinya, masyarakat Kabupaten Pati yang sudah memiliki hak suara dapat memilih pemimpin daerahnya secara langsung. Pilkada di Kabupaten Pati merupakan transisional yang sebelumnya Bupati dan Wakil Bupati dipilih oleh DPRD kini dipilih langsung oleh warga Pati. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati tahun 2006, ada 4 pasangan calon yang menjadi peserta pilkada. Yaitu pasangan Sudjoko,S.Pd dan H.Sunandar S.Pd.I; pasangan Drs. H.Kotot Kusmanto dan Drs.H.Ahmad Arsyad; pasangan H.Tasiman,SH dan Kartina Sukawati,SE,MM; pasangan H.Slamet Warsito dan H.M.Aniq Syahuri, LC.

Tabel 2.12
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Pati Tahun 2006

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Sudjoko,S.Pd dan H.Sunandar S.Pd.I	36.793
2	Drs. H.Kotot Kusmanto dan Drs.H.Ahmad Arsyad	92.041
3	H.Tasiman,SH dan Kartina Sukawati,SE,MM	195.599
4	H.Slamet Warsito dan H.M.Aniq Syahuri, LC	94.715

Sumber : KPU Kabupaten Pati tahun 2006

Jumlah penduduk yang terdaftar pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 952.200 pemilih sedangkan yang menggunakan hak pilihnya masing-masing sebanyak 493.083 pemilih atau sekitar 51,78 persen. Suara sah tercatat 44,23 persen (421.148 pemilih), dan suara tidak sah sebesar 7,55 persen

(71.935 suara), sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih sebesar 48,22 persen (459,117 suara). Pemilihan tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh pasangan H.Tasiman,SH dan Kartina Sukawati,SE,MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati periode 2006-2011.

Pilkada Pati tahun 2006 ini juga menjadi sorotan publik karena tingkat partisipasinya sangat rendah, sampai-sampai Kabupaten Pati menyandang preikat daerah dengan partisipasi politik paling rendah se-Jawa Tengah.

Saat itu, banyak yang menyebut bila warga Pati apatis terhadap politik hingga menyebabkan angka golongan putih (golput) sangat tinggi. Fenomena tersebut cukup menjadi pembelajaran bagi KPU RI sebagai pembelajaran.

2.4.10 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011

Pada tahun 2011, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati digelar pada tanggal 23 Juli 2011. Ada 6 (enam) pasangan calon yang menjadi peserta pilkada kala itu. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor; 47 tahun 2011, perolehan suara tiap-tiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah :

Tabel 2.13
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H.M. Slamet Warsito, BE, ST, MM dan DR. Hj. Sri Mulyani	118.059 (16,39%)
2	H.Sunarwi SH,MM dan Tejo Pramono	159.268 (22,11%)
3	Ir. H. Sri Merditomo, MM dan H. Karsidi, SH	118.625 (16,47%)
4	Sri Susahid, SH, MH dan Hasan, SH, MM	5.165 (0,47%)
5	H. Haryanto, SH, MM dan H.M.Budiyono	204.606 (28,40%)
6	Hj.Kartina Sukawati,SE, MM dan H. Supeno	114.635 (15,91 %)

Sumber : KPU Kabupaten Pati tahun 2011

Namun ternyata tidak ada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang perolehan suaranya mencapai lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, sehingga Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati dilanjutkan Pemilihan Putara Kedua yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor:48 tahun 2011, tanggal 27 Juli 2011. Peserta Pemilihan Putara kedua adalah :

1.) H. Haryanto, SH, MM dan H.M.Budiyono

2.) H.Sunarwi SH,MM dan Tejo Pramono

Selang beberapa hari setelah dikeluarkannya Keputusan KPU Pati Nomor 47/2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan Pemilukada Pati, muncul keberatan dari pihak Imam Suroso-Sudjoko dikarenakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H.Sunarwi, SE, MM dan Tejo Pramono, yang didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (DPC PDIP) bukanlah pasangan calon yang direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Pusat partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) . Kemudian berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Agustus 2011 telah menetapkan Amar Putusan Nomor : 82/PHPU.D.IX/2011 yang menyatakan mengabulkan permohonan H.Imam Suroso, MM dan Sujoko, S.Pd. M.Pd. Amar Putusan tersebut membatalkan Keputusan KPU Pati tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pati untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Pada pemungutan suara ulang, yang kembali diikuti oleh enam pasang calon, hanya saja berbeda pada pasangan calon nomor dua yang digantikan oleh pasangan H. Imam Suroso, MM dan Sujoko, S.Pd, M.Pd, pasangan Haryanto-Budiyono kembali meraup kemenangan dengan menempati posisi atau perolehan suara unggul yaitu sebanyak 38,35%. Selanjutnya melalui rapat internal KPUD Pati, pasangan ini kemudian ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Saerah Kabupaten Pati periode 2012-2017.

Akibat dari kasus pemungutan suara ulang tersebut kemudian menjadi acuan, landasan, dan dasar KPU untuk membuat regulasi baru yang berlaku di seluruh Indonesia. Dari kasus Pilkada Kabupaten Pati 2011 pula, surat rekomendasi untuk calon bupati dan wakil bupati akhirnya berubah menjadi wewenang partai sepenuhnya di tingkat pusat (DPP), karena sebelumnya tidak ada regulasi yang mengatur itu.

2.4.11 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2017

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Pati yang diselenggarakan pada 15 Februari 2017 kemarin hanya ada satu calon alias calon tunggal. Dari 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada secara serentak itu, 9 di antaranya hanya mempunyai calon tunggal, tanpa calon lain yang menyainginya. Salah satunya yaitu Kabupaten itu sendiri. Pasangan Haryanto-Saiful Arifin yang diusung PDIP, Partai Gerindra, PKB, Demokrat, Golkar, Hanura, PKS dan PPP (46 kursi di DPRD Pati) akan bertarung melawan kotak kosong.

Menariknya, pada Pilkada Pati kali ini ada relawan pendukung kotak kosong Pilkada Pati mengklaim memiliki jaringan relawan kotak kosong yang tersebar di

21 kecamatan dan 406 desa di Kabupaten Pati. Relawan ini menamai timnya dengan sebutan Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati .AKDP Pati juga mengklaim bahwa ia mempunyai 1000 lebih relawan yang siap membantu. AKDP Pati ingin menciptakan iklim demokrasi yang baik. Gerakan ini berangkat dari kesadaran agar pesta demokrasi di Pati berlangsung demokratis, sesuai dengan hati nurani. AKDP bermaksud ingin membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyosialisasikan, andaikata tidak memilih satu pasangan, setidaknya bisa memilih kotak kosong, bukan golput. Adanya calon tunggal juga merupakan fenomena yang baru dalam sejarah Pilkada Pati.

Meski ada gerakan relawan kotak kosong, pilkada di Bumi Mina Tani pada 15 Februari yang lalu dimenangkan oleh pasangan calon tunggal H. Aryanto, SH, MM, M.Si dan H. Saiful Arifin dengan perolehan 74.51% atau 519.627 suara. Sedangkan untuk kotak kosong memperoleh 25.49% atau 177.771 suara. Namun faktanya, ada 9 kecamatan yang suara pemilih kotak kosong melampaui 25% suara sah dan ada 17 desa dimana kotak kosong berhasil mengungguli pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Haryanto-Saiful Arifin. Sembilan kecamatan dengan suara pemilih kotak kosong melampaui 25% .

Pemilihan umum di Pati sendiri tak lepas dari adanya politik uang atau *money politics*. Politik uang biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi pilihan politik pemilih dengan menggunakan imbalan tertentu, atau secara sederhana dapat dikatakan sebagai tindakan jual beli suara. Sekalipun merusak proses demokrasi, namun bagi masyarakat Kabupaten Pati, praktek politik uang justru

menjadi sebuah kewajaran. Praktik politik uang di Kabupaten Pati diduga sudah merasuki berbagai pemilihan umum baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah, bahkan sampai pemilihan kepala desa.

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku politik uang membuat politik uang seolah sudah menjadi bagian dalam kehidupan politik di Kabupaten Pati. Tragisnya, sejumlah kasus politik uang yang ditemukan oleh panwaslu ataupun ditemukan oleh warga baik dalam pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilihan kepala daerah nyaris tidak terdengar adanya sanksi yang tegas. Hak tersebut juga dikarenakan pelaku praktik politik uang tampaknya sulit disentuh oleh hukum dan karena kasus *money politics* juga sulit dibuktikan.

Jargon khas dari masyarakat Kabupaten Pati yang selama ini sudah mengakar di setiap hajatan pemilihan umum adalah *ora uwek ora obos* (tidak ada uang tidak mencoblos atau memilih).¹³³ Jargon tersebut seolah menjadi cerminan bagaimana tradisi pemilu di Kabupaten Pati selalu identik dengan keberadaan politik uang. Akibatnya pola tersebut sudah dianggap sebagai sebuah kewajaran, dan akan menjadi “aneh” manakala dalam kegiatan politik tidak ada politik uang, sehingga siapapun harus menyiapkan dana melimpah jika ingin maju menjadi kontestan politik.

Keadaan demikian pada akhirnya memaksa para kandidat politik berusaha mendapatkan sumber dana dari berbagai pihak, yang tentunya tidak gratis karena akan menuntut imbalan komitmen untuk memuluskan dan melindungi

³³ Hasil Riset KPU Kabupaten Pati

kepentingan-kepentingan pihak sponsor. Tidak berhenti sampai di situ saja, keberadaan politik uang akan sangat membahayakan bagi proses dan cita-cita demokrasi. Karena dapat melahirkan berbagai macam implikasi, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Dampaknya akan membuat masyarakat semakin jauh dari kesejahteraan, lantaran pemimpin terpilih lebih disibukkan untuk membayar “hutang politik” daripada mengurus rakyatnya. Oleh karena itu, kualitas pemilu dan kualitas pemimpin juga sangat ditentukan oleh kualitas para pemilih. Apabila pemilihnya berkualitas maka akan lahir pemilu serta pemimpin yang berkualitas, dan sebaliknya.

Begitu pula adanya *money politics* pada Pilkada Pati 2017 kemarin, sebanyak 13 laporan masuk ke Panitia Pengawas Pemilu Pati (Panwaslu) sebagai dugaan politik uang. Hal tersebut menjadikan Pilkada Kabupaten Pati sebagai kabupaten dengan laporan politik uang terbanyak di Jawa Tengah. Laporan-laporan tersebut juga ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilu Pati, namun keputusan dari pembahasan di tingkat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dugaan politik uang tersebut tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. Karena itu pula, tidak ada laporan dugaan politik uang yang diproses hingga tingkat pengadilan. Dalam praktik di lapangan, untuk menindak pelaku politik uang memang kesulitan karena yang diancam pidana tidak hanya pemberi, melainkan penerimanya juga. Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku politik uang, tentunya harus ada operasi tangkap tangan, namun sulit direalisasikan. Perlu ada peninjauan kembali aturan tersebut karena praktiknya dalam penegakan di lapangan sulit dilaksanakan.